

ABSTRAK

Tumpang tindih sertipikat tanah (sertipikat ganda) merupakan permasalahan hukum yang sering dijumpai di masyarakat khususnya di Kota Semarang. Dari berbagai penelitian yang dilakukan di Kota Semarang terjadinya tumpang tindih sertipikat tanah, mayoritas disebabkan karena adanya kelalaian dari petugas pertanahan. Namun sampai sekarang permasalahan sertipikat ganda masih sangat banyak di temukan di Kota Semarang sehingga dibutuhkan langkah hukum yang tegas kepada petugas pertanahan untuk mengantisipasi banyaknya sertipikat ganda yang diterbitkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berusaha untuk mensinkronkan norma-norma hukum dengan kenyataan dilapangan yang disertai dengan hasil wawancara sebagai data primer dengan metode deskriptif kualitatif. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya sertipikat tumpang-tindih (sertipikat ganda) di Kantor Pertanahan Kota Semarang? dan bagaimana penerapan sanksi kesalahan dan kelalaian dalam penerbitan sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Semarang?. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor penyebab terjadinya sertipikat tumpang-tindih (sertipikat ganda) di Kantor Pertanahan Kota Semarang karena kesalahan petugas dalam melakukan pengukuran dan pemetaan dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kesalahan tersebut menimbulkan terjadinya sengketa letak, batas, dan luas bidang tanah yang sudah didaftarkan oleh para pemilik tanah. Akibat kesalahan dan kelalaian dalam penerbitan sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang sejatinya dapat menerapkan sanksi administratif, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Pemberian Sanksi tersebut kepada petugas Badan Pertanahan Nasional bertujuan untuk memberikan efek jera agar kedepannya dapat meningkatkan kehati-hatian dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah. Melalui penelitian ini diharapkan Badan Pertanahan Nasional dapat mengoptimalkan administrasi pertanahan dan pembuatan peta pertanahan dan perlu dibentuk suatu Badan Khusus yang bertugas untuk memberikan sanksi terhadap petugas Badan Pertanahan Nasional yang melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam menerbitkan sertipikat ganda.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Kelalaian, Sertipikat tanah

ABSTRACT

Overlapping land certificates (dual certificates) is a legal problem that is often encountered in the community, especially in the city of Semarang. From various studies conducted in the city of Semarang, the occurrence of overlapping land certificates, the majority were caused by negligence on the part of land officials. However, until now the problem of double certificates is still very much found in the city of Semarang so that strict legal steps are needed for defense officers to anticipate the number of double certificates issued. This study uses an empirical juridical approach that seeks to synchronize legal norms with the reality in the field accompanied by the results of interviews as primary data with qualitative descriptive methods. So that the problem in this scientific work is what are the factors that cause overlapping certificates (double certificates) at the Land Office of Semarang City? and how is the application of sanctions for errors and omissions in the issuance of double certificates at the Semarang City Land Office carried out by Semarang City Land Agency officers?. Based on the results of the study, it was found that the factors causing overlapping certificates (double certificates) at the Land Office of Semarang City were due to errors by officers in measuring and mapping and not in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. These errors lead to disputes over the location, boundaries, and area of land parcels that have been registered by the land owners. Due to errors and omissions in the issuance of double certificates at the Semarang City Land Office, administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions can be applied. The provision of these sanctions to officers of the National Land Agency aims to provide a deterrent effect so that in the future they can increase caution in the issuance of certificates of land rights. Through this research, it is hoped that the National Land Agency can optimize land administration and make land maps and it is necessary to form a Special Agency whose task is to impose sanctions on National Land Agency officers who commit negligence or intentionally in issuing multiple certificates.

Keywords: *Application of Sanctions, Negligence, Land Certificates*